

# RENCANA KERJA

TAHUN 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dimana Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2024-2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Matriks Rencana Kerja Tahun 2024 disusun menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat nomor 000.7.2.4/2154/BAPPEDA tanggal 15 Mei 2023 hal Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dituangkan pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2024 serta dapat mencapai hasil yang baik dalam pengembangan dalam bidang kepegawaian di Provinsi Kalimantan Barat yang kedepanya dapat diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunannya.

Pontianak, 2023

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat,



**Drs. ANI/SOFIAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650602 198603 1 018

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Dokumen Renja .....	5
BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .....	6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	23
II.4 Review Terhadap Rancangan RKPD .....	25
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	38
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	38
III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	39
III.3 Program dan Kegiatan .....	40
Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	41
Bab 5 PENUTUP .....	54

## LAMPIRAN

- Hasil Cetakan SIPD Renja BKD. Prov. Kalbar TA. 2024

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	7
Tabel 2. Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2022 .....	18
Tabel 3. Target dan Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2020 – 2022 .....	21
Tabel 4. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 .....	26
Tabel 5. Target Indikator Kinerja Tahun 2024.....	39
Tabel 6. Rencana Kerja Tahun 2024 BKD Prov. Kalbar .....	42

# BAB1 PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu ) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dimana sistematika penyusunannya disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui tahap persiapan; penyusunan; penyusunan rancangan; perumusan rancangan akhir; dan penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, serta Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Dalam proses penyusunan Renja ini telah disesuaikan dengan perubahan nomenkelatur Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 yang tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136) serta hasil rapat-rapat kerja atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian yang melibatkan instansi dan stakeholder terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penyusunan Renja ini memperhatikan hasil kinerja

program/kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor, koordinasi antar OPD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya.

Selanjutnya Renja Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dimana mengakomodir 2 (dua) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan yang mencakup :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan antara lain :
  - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
  - b. Mutasi dan Promosi ASN;
  - c. Pengembangan Kompetensi ASN; dan
  - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

## I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja 2024 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 nomor 104, Tambahan Lemabaran Negara RI nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5671);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomer 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan berakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 28 September 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136).

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **I.3.1 MAKSUD**

- a. Pedoman dan dasar penyusunan Kegiatan Tahun 2024.
- b. Acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

#### **I.3.2 TUJUAN**

- a. Penjabaran atas Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024-2026, dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran indikatif.

- b. Menyelaraskan program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dengan program nasional di bidang kepegawaian, program kabupaten/kota, isu-isu strategis, usulan-usulan pada forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang, serta saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang kepegawaian.

#### **I.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA**

Dokumen Renja 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I. Pendahuluan**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Dokumen Renja

##### **Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4 Review Terhadap RKPD

##### **Bab III. Tujuan dan Sasaran Renja**

- III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3 Program dan Kegiatan

##### **Bab IV. Rencana Program dan Kegiatan**

##### **Bab V. Penutup**

##### **Lampiran**

# **BAB 2** EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

## **II.1** EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan yang masih didasari oleh dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022.

TABEL 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	4	5	6	7	8
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>			<b>17.914.888.161</b>	<b>17.242.465.892</b>	<b>96,25</b>
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>12.318.258.273</b>	<b>11.909.030.252</b>	<b>96,68</b>
<b>5.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>98.097.300</b>	<b>97.671.065</b>	<b>99,57</b>
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.241.400	18.131.966	99,40
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	16.694.400	16.624.575	99,58
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	19.906.200	19.810.500	99,52
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	19.195.100	19.126.272	99,64

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	4	5	6	7	8
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	24.060.200	23.977.752	99,66
<b>5.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>10.464.365.441</b>	<b>10.073.536.038</b>	<b>96,27</b>
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan	10.186.249.941	9.795.623.125	96,17
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	217.860.000	217.860.000	100,00
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.236.000	3.095.852	95,67
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	57.019.500	56.957.061	99,89
<b>5.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>23.519.600</b>	<b>23.492.600</b>	<b>99,89</b>

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	4	5	6	7	8
5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	23.519.600	23.492.600	99,89
<b>5.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>96.999.400</b>	<b>96.666.401</b>	<b>99,66</b>
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Stel	34.305.700	34.300.110	99,98
5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	27.934.400	27.860.591	99,74
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Individu	82 Dokumen	3.064.300	3.015.700	98,41
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Minimal 20 JP	34 Orang	19.300.000	19.140.000	99,17
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Jumlah Sosialisasi	18 Orang	2.420.000	2.375.000	98,14
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	53 Orang	9.975.000	9.975.000	100,00
<b>5.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>716.364.300</b>	<b>714.525.028</b>	<b>99,74</b>

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	4	5	6	7	8
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	25.731.800	25.721.475	99,96
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	161.307.700	161.147.114	99,90
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	85.606.400	85.535.747	99,92
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	147.680.600	147.675.975	100,00
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3600 Dokumen	24.000.000	24.000.000	100,00
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	75.120.000	75.080.000	99,95
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	145.406.000	144.116.458	99,11
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	28.062.300	27.923.706	99,51

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	4	5	6	7	8
5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	23.449.500	23.324.553	99,47
<b>5.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>340.549.000</b>	<b>331.953.200</b>	<b>97,48</b>
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	12.768.000	12.700.000	99,47
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	38 Unit	327.781.000	319.253.200	97,40
<b>5.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>418.217.120</b>	<b>415.116.120</b>	<b>99,26</b>
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.300.000	22.199.000	99,55
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000	-	-
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	394.917.120	392.917.120	99,49

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	4	5	6	7	8
<b>5.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>160.146.112</b>	<b>156.069.800</b>	<b>97,45</b>
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	45.420.000	41.524.800	91,42
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	114.726.112	114.545.000	99,84
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>5.596.629.888</b>	<b>5.333.435.640</b>	<b>95,30</b>
<b>5.03.02.1.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>2.322.662.720</b>	<b>2.224.142.727</b>	<b>95,76</b>
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	75.850.500	75.688.893	99,79

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	4	5	6	7	8
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1.333.038.420	1.258.346.359	94,40
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	124.949.500	124.841.356	99,91
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	199.438.900	186.912.095	93,72
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	42.316.700	36.007.410	85,09
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	387.411.200	383.523.292	99,00
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	135.705.200	135.181.377	99,61
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	23.952.300	23.641.945	98,70
<b>5.03.02.1.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>1.166.582.100</b>	<b>1.044.704.308</b>	<b>89,55</b>

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	4	5	6	7	8
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	81.974.000	74.430.078	90,80
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	292.923.500	278.157.914	94,96
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	8 Dokumen	791.684.600	692.116.316	87,42
<b>5.03.02.1.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>1.483.857.868</b>	<b>1.450.937.303</b>	<b>97,78</b>
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	135 Orang	43.363.400	38.401.455	88,56
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	565 Dokumen	276.775.600	269.783.931	97,47
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3 Dokumen	562.298.380	554.710.039	98,65
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	401.453.838	390.028.712	97,15

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	4	5	6	7	8
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	67 Laporan	23.395.800	23.101.300	98,74
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	22.806.400	22.506.400	98,68
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	1381 Orang	53.005.250	52.913.550	99,83
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	3 Dokumen	100.759.200	99.491.916	98,74
<b>5.03.02.1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>623.527.200</b>	<b>613.651.302</b>	<b>98,42</b>
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10866 Dokumen	233.122.800	232.970.828	99,93
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	311 Orang	54.443.800	53.621.480	98,49
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	8577 Orang	154.501.300	148.473.947	96,10

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	4	5	6	7	8
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	131.778.200	128.978.957	97,88
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	49.681.100	49.606.090	99,85

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 umumnya menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan pada capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar Tahun 2022 dengan rerata capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara sebesar **47,07%** dengan persentase tingkat keberhasilan apabila dibandingkan dengan target sebesar **94,14%**. Sedangkan rerata capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD sebesar **100%** dan **105,08%** dengan persentase tingkat keberhasilan apabila dibandingkan dengan target sebesar **102,54%**. Dari pencapaian kedua rerata sasaran strategis tersebut diperoleh total rerata capaian kinerja sebesar **98,34%**.

Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah sesuai dengan harapan pada tahun 2022. Namun kedepannya diperlukan konsistensi dan upaya lebih dalam pencapaian target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya mengingat masih merebaknya Pandemi Covid-19 sehingga meyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan baik di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Capaian indikator tersebut mengacu pada RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023 serta Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih sebelumnya. Pada Tahun 2022 juga merupakan penerapan pencapaian indikator kinerja OPD yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan dan telah ditandatangani bersama Gubernur Terpilih.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 akan dilihat pada pencapaian indikator dan analisisnya pada IKU Dinas Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar. Capaian kinerja utama TA 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 2. Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja Tahun 2022		Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1.	Indeks Profesionalitas ASN	50	47,07	94,14
<b>RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1</b>						<b>94,14</b>
2.	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	2.1.	Indeks RB Perangkat Daerah	BB	BB	100
		2.2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,71	80,61	105,08
<b>RERATA CAPAIAN KINERJA SS 2</b>						<b>102,54</b>
<b>TOTAL RERATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>98,34</b>

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2023.

### 1. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator tersebut merupakan penjabaran dari misi ke 2 Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*” yang telah mengalami perubahan terhadap indikator sebelumnya yang disebabkan oleh hasil dari evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Capaian yang diperoleh merupakan capaian Tahun 2022 yang didapat melalui hasil koordinasi bersama BKN RI dimana surat resmi terhadap nilai akhir diperkirakan akan terbit pada pada akhir triwulan I Tahun 2023. Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh

yaitu 47,07 dengan skala 1-100 dan menandakan bahwa capaian pada tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 50 sesuai perjanjian kinerja. Komponen pencapaian kinerja terbagi atas dimensi kualifikasi (skor 13,66), kompetensi (skor 9,05), kinerja (19,36), dan disiplin (4,99).

## **2. Indeks RB Perangkat Daerah**

Capaian Indeks RB pada tahun 2022 merupakan penilaian RB yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat Inspektur Provinsi Kalimantan Barat nomor 700/185/ITPROV tanggal 22 Juni 2022 hal Reviu PMPRB atas LKE Unit pada BKD Prov. Kalbar dimana nilai RB yang diperoleh BKD Prov. Kalbar melalui penilaian LKE PMPRB yang disusun secara offline dan bukti pendukung yang telah dilaksanakan selama periode Bulan Mei 2021 s.d Bulan April Tahun 2022 adalah 26,87 (74,01%) dengan kategori BB.

Pelaksanaan penerapan RB di BKD Prov. Kalbar telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan penilaian yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa catatan dan saran hasil reviu yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki dalam rangka peningkatan nilai RB ditahun mendatang.

## **3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Capaian Nilai SAKIP pada tahun 2022 penilaian RB yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat Inspektur Provinsi Kalimantan Barat nomor 70/109/ITPROV tanggal 21 September 2022 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar Tahun 2022 dimana nilai SAKIP yang diperoleh BKD Prov. Kalbar melalui penilaian LKE SAKIP yang disusun secara offline dan bukti pendukung yang telah dilaksanakan adalah 80,60 dengan predikat A.

Pelaksanaan penerapan SAKIP di BKD Prov. Kalbar telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 4 (empat) komponen penilaian yang dilaksanakan yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Predikat A yang telah dicapai menunjukkan bahwa akuntabilitas yang telah diterapkan memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akintabel. Namun terdapat beberapa saran dan perbaikan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan dengan harapan agar kedepannya capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara menyeluruh terhadap komponen yang dinilai.

Indikator dan target pada tahun 2022 merupakan implementasi dari Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala BKD Prov. Kalbar sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 065/3473/RO-ORG tanggal 22 September 2022 hal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah dimana terdapat penambahan indikator kinerja yang wajib diakomodir oleh Kepala OPD yaitu Indeks RB Perangkat Daerah dan Nilai Sakip Perangkat Daerah. Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja selama periode 2020-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.Target dan Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2020 – 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Realisasi					
					2020		2021		2022	
					T	R	T	R	T	R
1	2	3		4	6	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	-	-	50,9	50	47,07
2	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	2.1	Indeks RB Perangkat Daerah	Predikat	-	B	-	BB	BB	BB
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	77,34	-	76,71	76,71	80,6

Keterangan : T = Target ; R = Realisasi

## **II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136), Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang kepegawaian daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data, disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peningkatan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas aparaturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang dicitakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

### **II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang

akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Nilai-nilai BerAkhlak sebagai Core Value yang menjadi dasar penguatan budaya kerja
- b. Pembangunan assesment center dan strategi pengembangan sumber daya manusia
- c. Penerapan kebijakan manajemen talenta dalam rangka penyempurnaan penerapan sistem merit.
- d. Optimalisasi proses pelayanan kepegawaian melalui sistem layanan kepegawaian serta penyamaan persepsi pelayanan kepegawaian antara BKN dan BKD Prov. Kalbar.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: Meningkatnya Sistem Merit dengan Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen kepegawaian adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan BKD Kalbar
3. Meningkatnya Penerapan Manajemen Aparatur Sipil Negara

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Pembangunan lembaga/unit assesment center dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia;
2. Penerapan kebijakan manajemen talenta dalam rangka penyempurnaan penerapan sistem merit;
3. Pengembangan layanan administrasi dan informasi kepegawaian berbasis elektronik;
4. Peningkatan Kualitas Penyusunan, Penetapan Kebutuhan, Pengadaan dan Pengangkatan PNS;
5. Penerapan Kebijakan Pola Karir Berbasis Sistem Merit;
6. Penerapan Manajemen Kinerja secara Objektif;
7. Peningkatan Pemberian Penghargaan dan Sanksi;
8. Peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan penggajian, tunjangan dan fasilitas; dan
9. Penerapan kode etik dan perlindungan bagi ASN.

## **II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD**

Perumusan Rancangan RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang telah disusun sebagai tahun pertama pelaksanaam RPD Prov. Kalbar Tahun 2024-2026 yang telah mengakomodir kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah. Namun terdapat penyesuaian antara RKPD Tahun 2024 dan Renja OPD Tahun 2024 dimana dalam penyusunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang maksimal, adil dan merata bagi masyarakat dengan penganggaran yang efisien.

Penyusunan Renja disusun dengan mengalokasikan pagu anggaran per sub kegiatansesuai dengan Renstra BKD Prov. Kalbar Tahun 2024-2026 yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
	<b>5.03</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR</b>					
<b>I.</b>	<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					
<b>A</b>	<b>5.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
1	5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Februari - September
3	5.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	September - November
4	5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Februari

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
5	5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Juli - Oktober
6	5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - April
7	5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
<b>B</b>	<b>5.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
1	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	80	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Juni
4	5.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Maret - Oktober

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
5	5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
6	5.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
<b>C</b>	<b>5.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					
1	5.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Agustus - Desember
2	5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
<b>D</b>	<b>5.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
1	5.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Maret
2	5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	80	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Maret

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
3	5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
4	5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	80	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
5	5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
6	5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	11	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
7	5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
<b>E</b>	<b>5.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
1	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
4	5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
5	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
6	5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3600	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
7	5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
8	5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	16	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
9	5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
10	5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
<b>F</b>	<b>5.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1	5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	30	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Maret
2	5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Maret
3	5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Maret
<b>G</b>	<b>5.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1	5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
<b>H</b>	<b>5.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1	5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
2	5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
4	5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
<b>II</b>	<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					
<b>A</b>	<b>5.03.02.1.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>					
1	5.03.02.1.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (dokumen)	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
4	5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
5	5.03.02.1.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
6	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
7	5.03.02.1.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
8	5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
9	5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
10	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
11	5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
12	5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
<b>B</b>	<b>5.03.02.1.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>					

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	6	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
<b>C</b>	<b>5.03.02.1.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>					
1	5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	200	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	2	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
4	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	4	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
5	5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
6	5.03.02.1.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	10	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
7	5.03.02.1.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
8	5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	80	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
9	5.03.02.1.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
10	5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	2	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
11	5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	500	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
12	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	400	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
13	5.03.02.1.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
<b>D</b>	<b>5.03.02.1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>					
1	5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.02.1.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
4	5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	5	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
5	5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	410	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
6	5.03.02.1.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
7	5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	9030	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
8	5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
9	5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	15	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
10	5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

# BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mengacu pada arah pembangunan bidang aparatur negara tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Sasaran tersebut didukung oleh ASN profesional, berintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat yang kolaboratif dan inklusif, organisasi birokrasi yang responsif dan adaptif, serta pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mencakup beberapa arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dengan arah kebijakan memperkuat implementasi sistem merit dalam manajemen ASN;
2. Terwujudnya arsitektur jaringan kerja pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif, dengan arah kebijakan penataan proses bisnis internal instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dan institusi pemerintah dengan non-pemerintah serta pelibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik;
3. Terwujudnya organisasi yang responsif dan adaptif, dengan arah kebijakan penataan organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional;
4. Terwujudnya pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik.

### III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis 2024-2026 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran yang dituangkan pada Rencana Kerja tahun 2024 sebagai bentuk penjabaran dari rencana pencapaian kinerja.

BKD Prov. Kalbar dalam Renja Tahun 2024 sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra BKD Prov. Kalbar 2024-2026 memiliki fokus pada **peningkatan nilai reformasi birokrasi, nilai sistem akuntabilitas kinerja, indeks kepuasan masyarakat, serta NSPK manajemen ASN**. Untuk target pencapaian pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel ebagai berikut :

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024
Meningkatnya Sistem Merit	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks RB Perangkat Daerah	Predikat	BB
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan BKD Kalbar	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	85
	Meningkatnya Penerapan Manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	88

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut dijabarkan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Program baik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Program Kepegawaian Daerah.

### **III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan Isu-isu penting pada urusan kepegawaian, RKPD Tahun 2024 dan tujuan serta sasaran Tahun 2024, maka Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar pada tahun 2024 disusun terdiri atas 2 (dua) program, 12 (duabelas) kegiatan, serta 61 (enam puluh satu) sub kegiatan dimana rincian rencana kerja ini telah disusun, diinput pada aplikasi SIPD, serta telah dilakukan asistensi oleh Bappeda Prov. Kalbar dan BKAD Prov. Kalbar.

# BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator input, output dan outcome, juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat terangkum dalam beberapa program serta dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan.

Dengan program dan kegiatan serta pendanaan yang telah disusun pada tahun 2024, ditujukan agar dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar baik untuk Indikator Kinerja Utama (Indikator Eselon II), Indikator Kinerja Program (Indikator Eselon III), dan Indikator Kinerja Kegiatan (Indikator Eselon IV)

Selanjutnya penjabaran program/kegiatan, pendanaan, serta target kinerja masing-masing sun kegiatan yang telah diinput pada aplikasi SIPD.go.id dapat dilihat pada **lampiran** Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini dimana pada lampiran tersebut telah terinci penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan pada kegiatan prioritas beserta anggaran yang telah disusun dalam rincian rencana kerja yang telah diinputkan.

Tabel 6. Rencana Kerja Tahun 2024 BKD Prov. Kalbar

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
	5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR				17.019.469.070		
I.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Sesuai Dengan Prosedur/Tepat Waktu	Persen	100	41.395.500		
			Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan SAP	Persen	100	11.359.777.970		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	Persen	100	555.966.589		
			Persentase Pegawai Dengan Kinerja "Baik"	Persen	97	80.319.600		
			Nilai Kepuasan Layanan Internal	Nilai	A	833.809.500		
A	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	Persen	100	29.822.800		
			Persentase laporan kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	100	11.572.700		

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
1	5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	7.602.100	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.313.200	Provinsi Kalimantan Barat	Februari - September
3	5.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.198.000	Provinsi Kalimantan Barat	September - November
4	5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.927.700	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Februari
5	5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.781.800	Provinsi Kalimantan Barat	Juli - Oktober
6	5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	5.317.400	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - April
7	5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	6.255.300	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
B	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	3	11.366.977.970		

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
		Perangkat Daerah						
1	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	80	11.119.469.070	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	229.560.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.037.800	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Juni
4	5.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	2.737.900	Provinsi Kalimantan Barat	Maret - Oktober
5	5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	7.774.200	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
6	5.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	4.399.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
C	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	8.231.800		

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
1	5.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.643.300	Provinsi Kalimantan Barat	Agustus - Desember
2	5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.588.500	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
D	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur	Persen	100	26.069.600		
			Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Perencanaannya	Persen	100	54.250.000		
1	5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	88	8.800.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Maret
2	5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	9.812.600	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	80	7.457.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
4	5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	40.000.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
5	5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	5.700.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
6	5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	8.550.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
E	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang	Persen	100	834.109.500		
1	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	17.625.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	125.018.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	32.218.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
4	5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	78.000.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
5	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	162.486.200	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
6	5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3600	30.000.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
7	5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	24.000.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
8	5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	350.000.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
9	5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	8.862.300	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
10	5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	5.900.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
F	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas	Persen	100	85.700.000		
1	5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	85.700.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Maret
G	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	293.332.399		

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
1	5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	22.387.759	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	270.944.640	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
H	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Persen	90	161.553.000		
1	5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	50.010.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	15.000.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	96.543.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
II	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Sesuai Formasi / Kebutuhan	Persen	60	1.904.963.300		
			Persentase ASN yang dilakukan pengembangan	Persen	90	1.795.873.801		
			Persentase Peningkatan Kinerja dan	Persen	90	447.012.200		

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
			Disiplin ASN					
A	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan formasi Pengadaan ASN	Persen	90	426.077.000		
			Persentase Layanan Pemberhentian ASN	Persen	100	120.141.600		
			Persentase Pengelolaan data dan Informasi ASN	Persen	100	321.921.800		
2	5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	192.430.500	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	233.646.500	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
6	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	120.141.600	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
8	5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	199.731.300	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
10	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	166.763.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
11	5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	142.928.800	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
12	5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	12.230.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
B	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pengelolaan Mutasi PNS	Persen	90	108.012.900		
			Persentase pengelolaan kenaikan pangkat, gaji berkala, peningkatan pendidikan, peninjauan masa kerja, dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Persen	95	485.039.700		
			Persentase Pelaksanaan Promosi dan Mutasi JPT, Adminstrator, dan Pengawas	Persen	85	244.039.000		
1	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	1	108.012.900	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	6	485.039.700	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	244.039.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
C	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang diberikan layanan administrasi kompetensi	Persen	90	1.554.744.101		
			Persentase ASN yang diberikan pelayanan administrasi dan pembinaan Jabatan Fungsional	Persen	90	241.129.700		

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
1	5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	3	25745000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
2	5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	3	251.118.600	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
3	5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4	684.917.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
4	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	14	557.598.501	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
5	5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	2	35.365.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
6	5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	50	1.279.200	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
7	5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	1	24.018.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
8	5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	100	48.396.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
12	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	500	167.436.500	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
D	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penyampaian laporan kinerja ASN	Persen	90	59.923.900		
			Persentase ASN yang akan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan	Persen	90	186.109.900		
			Persentase Penanganan pelanggaran disiplin ASN	Persen	90	196.678.700		
2	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	62.223.600	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
4	5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	5	46.160.500	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
5	5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	410	63.304.300	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
7	5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	9527	139.949.400	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
8	5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12	89.114.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024		Lokasi	Waktu Pelaksanaan
					Kinerja	Pendanaan		
9	5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	15	14.397.400	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember
10	5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	1	29.863.000	Provinsi Kalimantan Barat	Januari - Desember

## BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 (Renja 2024) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalbar Tahun 2024 memuat kebijakan program dan kegiatan yang berorientasi pada Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Renja sebagai pedoman bagi BKD Prov. Kalbar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dibawah Pembinaan Gubernur Kalimantan Barat. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu terkait dengan peningkatan kinerja aparatur melalui inovasi-inovasi sesuai dengan peningkatan teknologi yang berkembang saat ini. Diharapkan adanya inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dan diterapkan oleh OPD maupun individu sehingga kinerja pegawai tetap maksimal dan pencapaian target OPD dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan agar Renja Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan RKA dan DPA OPD tahun 2024 serta dapat pula digunakan oleh segenap *stakeholders* dan sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat,

  
**Drs. ANI SOFIAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650206 198603 1 018

## **Lampiran**

**Hasil Cetak Renja BKD. Prov. Kalbar TA. 2024 pada SIPD-RI.go.id**

**USULAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**  
**SEMUA USULAN**

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					-		
	<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>			<b>19.171.000.000,00</b>		
	<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>13.598.000.000,00</b>		
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			<b>119.000.000,00</b>		
	5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	18.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	16.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	10.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	10.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	3 Laporan	20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	4 Laporan	25.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			<b>11.600.000.000,00</b>		
	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	80 Orang / Bulan	11.300.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	12 Dokumen	220.000.000,00	Dalam Pembahasan	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
	5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	5.000.000,00 5.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - <i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	10.000.000,00 10.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD - <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	4 Laporan	60.000.000,00 60.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	5.000.000,00 5.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			34.000.000,00		
	5.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - <i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	5.000.000,00 5.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - <i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	25.000.000,00 25.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD - <i>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	4.000.000,00 4.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			225.000.000,00		
	5.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Unit	50.000.000,00 50.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	80 Paket	80.000.000,00 80.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - <i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	55.000.000,00 55.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - <i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	80 Dokumen	5.000.000,00 5.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - <i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	15 Orang	20.000.000,00 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
	5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	11 Orang	5.000.000,00 5.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	20 Orang	10.000.000,00 10.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			769.000.000,00		
	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	12 Paket	25.000.000,00 25.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	12 Paket	180.000.000,00 180.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	12 Paket	90.000.000,00 90.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	12 Paket	60.000.000,00 60.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	12 Paket	140.000.000,00 140.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	3600 Dokumen	24.000.000,00 24.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu - Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	60.000.000,00 60.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Dalam dan Luar Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	16 Laporan	140.000.000,00 140.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	25.000.000,00 25.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	25.000.000,00 25.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.000.000,00		

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
	5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel - <i>Pengadaan Mebel</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	30 Paket	100.000.000,00 100.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	15 Unit	160.000.000,00 160.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	2 Unit	50.000.000,00 50.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			341.000.000,00		
	5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	10.000.000,00 10.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	1.000.000,00 1.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	330.000.000,00 330.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			200.000.000,00		
	5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	3 Unit	50.000.000,00 50.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel - <i>Pemeliharaan Mebel</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	20 Unit	20.000.000,00 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	150 Unit	110.000.000,00 110.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	5 Unit	20.000.000,00 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>5.573.000.000,00</b>		
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.660.000.000,00		
	5.03.02.1.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN - <i>Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00	Dalam Pembahasan	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
	5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN - <i>Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	<b>300.000.000,00</b> 300.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK - <i>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	<b>250.000.000,00</b> 250.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - <i>Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN - <i>Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian - <i>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	<b>150.000.000,00</b> 150.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN - <i>Evaluasi Pemberhentian ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN - <i>Fasilitasi Lembaga Profesi ASN</i>	(Dalam dan Luar Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Lembaga	<b>200.000.000,00</b> 200.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN - <i>Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian - <i>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	<b>390.000.000,00</b> 390.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian - <i>Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	<b>150.000.000,00</b> 150.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian - <i>Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	<b>60.000.000,00</b> 60.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN			<b>1.300.000.000,00</b>		
	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN - <i>Pengelolaan Mutasi ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	<b>150.000.000,00</b> 150.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN - <i>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	6 Laporan	<b>330.000.000,00</b> 330.000.000,00	Dalam Pembahasan	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN - <i>Pengelolaan Promosi ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	8 Dokumen	820.000.000,00 820.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN			1.915.000.000,00		
	5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN - <i>Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	200 Orang	45.000.000,00 45.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center - <i>Pengelolaan Assessment Center</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	4 Dokumen	253.000.000,00 253.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN - <i>Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	2 Dokumen	642.000.000,00 642.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN - <i>Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	4 Dokumen	490.000.000,00 490.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat - <i>Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	55.000.000,00 55.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional - <i>Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	10 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional - <i>Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	20.000.000,00 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN - <i>Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	80 Orang	20.000.000,00 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional - <i>Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	20.000.000,00 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN - <i>Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	2 Laporan	70.000.000,00 70.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - <i>Pembinaan Jabatan Fungsional ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	500 Orang	60.000.000,00 60.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional - <i>Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	400 Dokumen	120.000.000,00 120.000.000,00	Dalam Pembahasan	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
	5.03.02.1.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional - <i>Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	20.000.000,00 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			698.000.000,00		
	5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - <i>Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	15.000.000,00 15.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - <i>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	4 Dokumen	83.000.000,00 83.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - <i>Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	30.000.000,00 30.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai - <i>Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	5 Orang	70.000.000,00 70.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai - <i>Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	410 Orang	65.000.000,00 65.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur - <i>Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Dokumen	20.000.000,00 20.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN - <i>Pembinaan Disiplin ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	9030 Orang	170.000.000,00 170.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN - <i>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	12 Laporan	150.000.000,00 150.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai - <i>Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	15 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00	Dalam Pembahasan	
	5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN - <i>Evaluasi Disiplin ASN</i>	(Kalbar, KALIMANTAN BARAT)	1 Laporan	45.000.000,00 45.000.000,00	Dalam Pembahasan	
		<b>JUMLAH</b>			<b>19.171.000.000,00</b>		